



XINHUA

PIDATO PRESIDEN XI JINPING DALAM HARI NASIONAL TIONGKOK

Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan pidato dalam Resepsi Hari Nasional dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 Tiongkok di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (28/9). Hari Nasional Tiongkok dirayakan setiap 1 Oktober setiap tahun sekaligus menjadi bagian dari libur selama sepekan (Golden Week) yang pada tahun ini berlangsung mulai 29 September - 6 Oktober 2023.

Republik Nagorno-Karabakh Bubarkan Diri Mulai Januari 2024

Pasukan Azerbaijan merebut kembali kendali penuh atas wilayah Nagorno Karabakh.

YEREVAN (IM) - Pemerintahan separatis Nagorno-Karabakh mengatakan akan membubarkan diri dan republik yang tidak diakui itu akan lenyap pada akhir tahun setelah upaya kemerdekaan selama hampir tiga dekade. Sementara para pejabat Armenia mengatakan, lebih dari separuh penduduk di kawasan itu sudah mengungsi.

Langkah tersebut dilakukan setelah Azerbaijan melancarkan serangan kilat pekan lalu. Mereka merebut kembali kendali penuh atas wilayah tersebut dan menuntut agar pasukan Armenia di Nagorno-Karabakh dilucuti dan pemerintah separatis membubarkan diri.

Sebuah dekret ditandatangani oleh pemimpin separatis di wilayah tersebut Samvel Shakhramanyan mengutip kesepakatan yang dicapai pada 20 September. Pernyataan ini mengakhiri pertempuran dengan Azerbaijan akan

mengizinkan "pergerakan bebas, sukarela, dan tanpa hambatan dari penduduk Nagorno-Karabakh ke Armenia. Hal ini memicu eksodus massal etnis Armenia dari wilayah pegunungan di Azerbaijan pada pekan ini.

Pada Kamis (28/9) pagi, lebih dari 66 ribu orang atau lebih dari separuh populasi Nagorno-Karabakh yang berjumlah 120 ribu orang telah melarikan diri ke Armenia. Gelombang pengungsi tersebut terus berlanjut dengan intensitas yang tidak berkurang.

Pertempuran separatis berakhir pada 1994 setelah runtuhnya Uni Soviet, Nagorno-Karabakh berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia yang didukung oleh pemerintah Armenia.

Kemudian, selama perang enam minggu pada 2020, Azerbaijan merebut kembali sebagian wilayah di Pegunungan Kaukasus selatan beserta wilayah sekitarnya yang telah

diklaim sebelumnya oleh pasukan Armenia.

Sedangkan Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Azerbaijan. Pada Desember tahun lalu, Azerbaijan memberlakukan blokade terhadap satu-satunya jalan yang menghubungkan Nagorno-Karabakh dengan Armenia.

Tindakan itu dilakukan dengan tuduhan bahwa pemerintah Armenia menggunakan jalan tersebut untuk ekstraksi mineral. Yerevan diduga melakukan pengiriman senjata terlarang ke pasukan separatis di wilayah tersebut.

Armenia menuduh penutupan tersebut menghalangi pasokan makanan pokok dan bahan bakar ke Nagorno-Karabakh. Azerbaijan menolak tuduhan tersebut dengan alasan wilayah tersebut dapat menerima pasokan melalui kota Aghdam di Azerbaijan.

Pengiriman yang dilakukan Azerbaijan telah lama ditentang oleh otoritas Nagorno-Karabakh, yang menyebutnya sebagai strategi bagi Azerbaijan untuk menguasai wilayah tersebut.

Dilemahkan oleh blokade

tersebut dan kepemimpinan pemerintah Armenia menjauhkan diri dari konflik tersebut, pasukan etnis Armenia di wilayah tersebut setuju untuk meletakkan senjata kurang dari 24 jam setelah Azerbaijan memulai serangannya pekan lalu. Pembicaraan telah dimulai antara Baku dan otoritas separatis Nagorno-Karabakh mengenai integrasi kembali wilayah tersebut.

Pihak berwenang Azerbaijan berjanji menghormati hak-hak etnis Armenia di wilayah tersebut dan memulihkan pasokan. Namun, banyak penduduk yang memutuskan untuk berangkat ke Armenia karena takut akan pembalasan.

Satu-satunya jalan yang menghubungkan Nagorno-Karabakh ke Armenia dengan cepat dipenuhi mobil, sehingga menimbulkan kemacetan besar di jalan pegunungan yang berkelok-kelok.

Sejauh ini belum ada laporan mengenai warga yang membakar rumah sebelum pergi. Peristiwa ini terjadi pada 2020 ketika orang-orang meninggalkan wilayah yang diambil alih oleh Azerbaijan.

Belum jelas kabar apakah masih tersisa etnis Armenia

yang masih tinggal di wilayah tersebut. Keputusan Shakhramanyan mendesak penduduk Nagorno-Karabakh untuk membiasakan diri dengan kondisi reintegrasi yang ditawarkan oleh Azerbaijan.

Pihak berwenang Azerbaijan mendakwa mantan kepala pemerintah separatis Nagorno-Karabakh Ruben Vardanyan. Dia dituduh telah mendanai terorisme, membentuk formasi bersenjata ilegal, dan melintasi perbatasan negara secara ilegal.

Bankir miliarder itu ditangkap pada Rabu (27/9). Menurut kantor berita resmi pemerintah Rusia RIA Novosti, dia akan menghadapi hukuman hingga 14 tahun penjara jika terbukti bersalah. Pejabat Azerbaijan mengatakan Vardanyan ditahan ketika dia mencoba memasuki Armenia dari Nagorno-Karabakh bersama ribuan orang lainnya dan dibawa ke Baku. Penangkapan tersebut tampaknya menunjukkan niat Azerbaijan untuk segera menegakkan cengkramannya di wilayah tersebut.

Vardanyan pindah ke Nagorno-Karabakh pada 2022 dan memimpin pemerintahan daerah selama beberapa bulan sebelum mengundurkan diri awal tahun ini. ● **gul**

Bank Dunia Diduga Biayai Program yang Melanggar HAM di Tanzania

KAMPALA (IM) - Lembaga pengawas hak asasi manusia (HAM) Oakland Institute menuduh Bank Dunia membiayai program pemukiman manusia membiayai pembangunan proyek yang melanggar HAM di Tanzania.

Bank Dunia telah gagal meminta pertanggungjawaban pihak berwenang Tanzania atas pelanggaran HAM yang serius terkait dengan perluasan Taman Nasional Ruaha di bagian selatan. Tindakan ini termasuk pembunahan di luar proses hukum dan penyerangan seksual. "Ini hanyalah episode lain dari meningkatnya kampanye kekerasan yang dilancarkan oleh pemerintah Tanzania terhadap masyarakat yang tinggal di dekat (kawasan lindung) di seluruh negeri," kata laporan Oakland Institute.

Laporan yang dikeluarkan oleh badan pengawas yang berbasis di California ini adalah hasil penyelidikan berbulan-bulan. Dalam penyelidikan menemukan bukti kesalahan yang dilakukan oleh penjaga taman yang sebagian didanai melalui proyek Bank Dunia senilai 150 juta dolar AS yang dikenal dengan akronim REGROW.

"Situasi buruk yang terjadi di bagian selatan negara ini tidak dilaporkan, meskipun terjadi proses perampasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serupa, serta adanya keinginan yang sama untuk meningkatkan pendapatan pariwisata," ujar laporan badan yang secara teratur memantau pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat.

Pada Oktober 2022, menteri pemerintah Tanzania yang membidangi pertanian dan pemukiman manusia mengumumkan rencana untuk mengungsi penduduk dari lima desa dengan total populasi lebih dari 21 ribu jiwa. Peng-

gusuran pun sudah semakin dekat dengan komunitas yang terkena dampak termasuk masyarakat penggembala Maasai, Datoga, dan Sangu.

Taktik brutal pemerintah Tanzania untuk mengusir masyarakat dan mengembangkan pariwisata di Taman Nasional Ruaha terkait erat dengan pendanaan yang diberikan oleh Bank Dunia. Dalam korespondensi dengan Oakland Institute, Bank Dunia mengatakan, pihaknya tidak mendanai upaya otoritas Tanzania untuk mengurusi batas-batas taman nasional.

Bank Dunia mencatat, bahwa mereka tidak mendanai pengadaan senjata. Badan itu menegaskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan perluasan batas taman berada di luar cakupan REGROW, yang dimulai pada 2017.

Menurut Bank Dunia, mereka tidak menoleransi kekerasan dalam proyek yang dibiayainya. Panel pengawas pun sedang meninjau keluhan terkait REGROW untuk menentukan audit kepatuhan sudah dilakukan atau belum mempromosikan kekhawatiran yang diangkat memang beralasan.

Tanzania sangat bergantung pada pendapatan pariwisata untuk membiayai anggarannya. Negara tersebut telah lama berupaya mengembangkan taman nasionalnya yang luas dalam upaya menarik lebih banyak pengunjung. Puluhan ribu komunitas di wilayah lain di Tanzania telah terjebak dalam upaya ini, sehingga membuat pihak berwenang setempat menjadi sorotan atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga sipil. Penista-penista ini termasuk pengusiran dengan kekerasan terhadap 70 ribu orang Maasai dari lahan penggembalaan di daerah Loliondo untuk membuka lahan yang luas untuk berburu trofi. ● **ans**

Kim Jong-un Dorong Korut Tingkatkan Produksi Senjata Nuklir

PYONGYANG (IM) - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un menyerukan peningkatan eksponensial dalam produksi senjata nuklir. Peningkatan ini dalam upaya Pyongyang memainkan peran yang lebih besar dalam kolaborasi melawan Amerika Serikat (AS) dalam Perang Dingin baru.

Kantor berita resmi pemerintah Korut KCNA melaporkan pada Kamis (28/9), Kim menggambarkan dunia sedang memasuki Perang Dingin baru. Dia menegaskan, Korut harus meningkatkan kemampuan nuklirnya sebagai tanggapan.

Kim melontarkan komentar tersebut dalam sesi dua hari parlemen Korut pada 26-27 September. Dalam sesi itu mengamandemen konstitusi untuk memasukkan kebijakannya memperluas program senjata nuklir Pyongyang.

KCNA melaporkan, para anggota majelis memberikan persetujuan dengan suara bulat terhadap klausul baru dalam konstitusi. Konstitusi ini dinilai menjamin hak negara untuk hidup dan berkembang, mencegah perang, dan melindungi perdamaian regional dan global dengan mengembangkan senjata nuklir secara cepat ke tingkat yang lebih tinggi.

"Kebijakan pembangunan kekuatan nuklir Korea Utara telah dijadikan permanen sebagai hukum dasar negara, yang tidak boleh diubah oleh siapa pun," kata Kim dalam pidatonya di sidang tersebut.

Kim menekankan perlunya mendorong upaya untuk meningkatkan produksi senjata nuklir secara eksponensial dan mendiversifikasi cara serangan nuklir. Sesi Majelis Rakyat Tertinggi diadakan

setelah Kim melakukan perjalanan ke Far East Rusia bulan ini. Dia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengunjungi situs militer dan teknologi.

Kunjungan tersebut memicu kekhawatiran Barat mengenai kemungkinan aliansi senjata dengan keterlibatan Korut memasok amunisi yang sangat dibutuhkan Putin di Ukraina. Tawaran ini menjadi imbalan bantuan ekonomi dan teknologi canggih Moskwa untuk meningkatkan sistem nuklir dan rudal Pyongyang. Ketika Korut perlahan-lahan mengakhiri pengucian akibat pandemi Covid-19, Kim telah secara aktif meningkatkan kemitaannya dengan Moskwa dan Beijing. Dia berupaya untuk keluar dari isolasi diplomatik dan bergabung dalam front persatuan melawan Washington. ● **ans**



IDN/ANTARA

AFGHANISTAN DIDESAK IZINKAN ANAK PEREMPUAN KEMBALI BERSEKOLAH

Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis (kanan, belakang) berbicara pada konferensi pers di markas besar PBB di New York, Kamis (28/9), mendesak pihak berwenang Afghanistan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka yang melarang perempuan dan anak perempuan mendapatkan pendidikan yang layak.

Pengadilan HAM Eropa Putuskan Vonis Pengadilan Turki Salah

ANKARA (IM)-Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) memutuskan vonis pengadilan Turki pada seorang guru yang dituding terlibat aktivitas terorisme seperti menggunakan aplikasi atau memiliki rekening di bank tertentu melanggar hukum. Hal ini dapat berdampak luas bagi ribuan orang yang menghadapi tuduhan serupa di Turki.

ECHR memutuskan Turki melanggar tiga pasal Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) Pasal 6, yang menyangkut hak atas pengadilan yang adil. Pasal 7 tentang tidak ada hukuman tanpa hukum dan Pasal 11 tentang kebebasan berkumpul dan berserikat. Pengadilan Eropa memutuskan Turki harus memberi kompensasi pada guru yang bernama Yüksel Yalçınkaya sebesar 15.000 euro. Pada tahun 2017 pengadilan pidana tinggi Turki memvonis Yalçınkaya hukuman enam tahun tiga bulan penjara karena menjadi anggota organisasi teroris yang memiliki afiliasi dengan gerakan Gulen.

Keputusan pengadilan berdasarkan dugaan penggunaan aplikasi ByLock, keanggotaan dalam serikat buruh dan asosiasi yang berafiliasi dengan gerakan Gulen dan memiliki rekening di Bank Asya. Hukuman Yalçınkaya dikuatkan Mahkamah Agung pada bulan Oktober 2018.

Mahkamah Konstitusi Turki juga menolak permohonan yang diajukan Yalçınkaya. Pengadilan Eropa mengkritik penggunaan aplikasi pesan terenkripsi ByLock sebagai bukti. Dasar keputusan itu dianggap terlalu luas dan sewenang-wenang, serta tidak memiliki perlindungan yang diperlukan untuk melaksanakan pengadilan yang adil.

Selain itu, pengadilan menunjukkan adanya kekurangan prosedur yang signifikan dalam persidangan Yalçınkaya. Termasuk tidak memberinya akses terhadap bukti atau mengizinkan pemeriksaan data secara independen.

ECHR juga mencatat pihak berwenang Turki menggunakan keanggotaan sah Yalçınkaya dalam serikat pekerja sebagai bukti yang memberatkannya, sehingga melanggar haknya atas kebebasan berkumpul dan berserikat berdasarkan Pasal 11 Konvensi Eropa. Keputusan tersebut memiliki implikasi yang lebih luas untuk kasus serupa di Turki, dan menekankan perlunya penegakan hukum yang selaras dengan standar hak asasi manusia Eropa.

Keputusan tersebut kemungkinan akan berdampak pada hukuman atau persidangan terhadap ribuan orang yang menghadapi tuduhan terorisme karena afiliasi mereka dengan gerakan Gulen, sebuah kelompok berbasis agama yang dituduh pemerintah Turki mendalangi kudeta yang gagal pada tahun 2016 dan ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Gerakan ini dengan tegas menyangkal keterlibatannya dalam kudeta yang gagal atau aktivitas teroris apa pun. Putusan Yalçınkaya ini sangat berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya seperti yang memimpin pengusahan filantropis Osman Kavala dan pemimpin Kurdi Selahattin Demirtaş, yang fokus pada keputusan penahanan. Sebaliknya, kasus ini membahas manfaat hukuman.

Setelah upaya kudeta, pemerintah Turki menerima berbagai aktivitas seperti memiliki rekening di Bank Asya yang sekarang ditutup, menggunakan aplikasi kirim-pesan terenkripsi ByLock yang tersedia di App Store Apple dan Google Play; dan berlangganan harian Zaman atau publikasi lain yang berafiliasi dengan anggota gerakan tersebut sebagai tolok ukur untuk mengidentifikasi dan menangkap orang yang diduga pengikut gerakan Gulen atas tuduhan keanggotaan dalam organisasi teroris.

Lebih dari 130.000 pegawai negeri dipecat dari pekerjaannya dalam pembersihan besar-besaran yang diluncurkan oleh pemerintah Turki setelah upaya kudeta dengan alasan bahwa mereka memiliki hubungan dengan organisasi teroris. Yalçınkaya adalah salah satunya. Dalam sidang besar di bulan Januari, pengacara Yalçınkaya, Johan Heymans dan Vande Lanotte, dalam pernyataan pembelaan mereka mengatakan penuntutan terhadap klien mereka merupakan tanda nyata adanya pelanggaran hak asasi manusia di Turki. Para pengacara mengatakan ByLock tersedia di Apple Store dan Google Play dan mengunduh aplikasi ini tidak akan membuat siapa pun menjadi penjahat.

Para pengacara juga mengatakan ada ribuan pendukung Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang mengunduh aplikasi ini tetapi belum menghadapi tuntutan apa pun. ECHR menyatakan menyatakan penggunaan ByLock bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diputuskan pada bulan Juli 2021 dalam kasus mantan petugas polisi Tekin Akgün bahwa penggunaan aplikasi ByLock bukanlah pelanggaran itu sendiri dan tidak merupakan bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan.

Namun, meskipun ada keputusan ECHR, penahanan dan penangkapan berdasarkan penggunaan ByLock terus berlanjut di Turki. Menurut pengacara Yalçınkaya, agen intelijen Turki MIT mengumpulkan informasi intelijen tentang pengguna ByLock secara tidak sah tanpa keputusan pengadilan, dan klien mereka menggunakan aplikasi tersebut untuk waktu yang singkat pada tahun 2015.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 311/1-f KUHP dan Pasal 90 Konstitusi Turki, keputusan ECHR mengenai pelanggaran akan menjadi dasar untuk mengadili ulang Yalçınkaya. Jika bukti yang melanggar hukum diabaikan, kemungkinan besar akan terjadi pembebasan. Turki kini menghadapi teka-teki hukum. Keputusan tersebut mengamanatkan bahwa keputusan tersebut harus dilaksanakan tidak hanya untuk Yalçınkaya tetapi untuk semua orang yang berada dalam situasi yang sama, suatu efek yang dikenal sebagai efek obyektif dari keputusan tersebut.

Keputusan ini diperkirakan akan mengarah pada serangkaian persidangan ulang dan potensi reformasi hukum yang signifikan di Turki. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menempatkan Turki dalam tekanan finansial dan berdampak pada reputasinya di kalangan hak asasi manusia internasional. ● **ans**

Dua Orang Tewas Dalam Penembakan di Rotterdam

ROTTERDAM (IM) - Penembakan massal terjadi di dua lokasi berbeda di Rotterdam, Belanda. Insiden tersebut menyebabkan korban jiwa. Dilaporkan sejumlah orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis (28/9) waktu setempat. Berikut sederet fakta yang diketahui sejauh ini terkait insiden penembakan massal di Rotterdam, Belanda.

Dilansir AFP, Jumat (29/9), penembakan massal terjadi di dua tempat terpisah di Rotterdam, Belanda. Kepala polisi Fred Westerbeke mengatakan penembakan pertama terjadi di sebuah rumah. Kemudian pelaku pindah dan melakukan penembakan ke ruang kelas di rumah sakit Erasmus MC.

"Pertama terjadi penembakan di lantai empat. Empat atau lima tembakan dilepaskan. Kemudian bom molotov dilemparkan ke pusat pendidikan," kata seorang mahasiswa kedokteran yang dikutip oleh RTL Nieuws, yang tidak menyebutkan namanya.

Insiden penembakan massal di dua tempat berbeda di Rotterdam itu mengakibatkan korban jiwa. "Dua insiden penembakan di Rotterdam telah memakan korban jiwa," kata polisi setempat kota tersebut dalam pernyataan di akun media sosial X (sebelumnya Twitter).

Sebanyak dua orang tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Seperti dilansir AFP, satu korban tewas adalah seorang wanita berusia 39 tahun dan putrinya berusia 14 tahun mengalami luka serius. Sementara korban tewas lainnya merupakan seorang guru berusia 46 tahun. Sementara itu, Pelaku penembakan massal di Rot-

terdam itu juga disebut sempat membakar sebuah rumah sakit. Berdasarkan kantor berita lokal ANP, kebakaran terjadi di rumah sakit, pusat medis Erasmus MC.

Saat itu, polisi setempat langsung menyerbu rumah sakit, ketika petugas medis yang panik keluar dari gedung sambil mendorong pasien dengan kursi roda dan tandu. "Ada banyak keribadan dan teriakan. Saya tidak mendengar suara tembakan apa pun, hanya kepanikan dan itulah yang saya mulai bertindak," lembaga penyiaran publik NOS mengutip pernyataan saksi mata lainnya.

Dilansir AFP, Jumat (29/9) pria tersebut mengenakan pakaian gaya tempur, bertubuh tinggi, dengan rambut hitam dan membawa ransel. Selain itu, pelaku penembakan massal itu juga diperkirakan hanya memiliki satu senjata api dan tidak ada indikasi memiliki kaki tangan. Polisi menyebut, pria bersenjata tersebut berusia 32 tahun.

Pihak kepolisian telah menangkap satu orang pria bersenjata yang merupakan pelaku penembakan massal di Rotterdam, Belanda. Dilansir AFP, Kamis (28/9), pria berusia 32 tahun itu tertangkap setelah bersembunyi di rumah sakit.

Sementara terkait motif penyerangan belum diketahui. Kepala jaksa penuntut umum Hugo Hillenaar mengatakan mengatakan pihaknya masih menyelidiki motif serangan tembakan massal yang dilakukan pria berpakaian tempur tersebut. "Kami belum bisa mengatakan apa pun tentang motif tindakan mengincar ini saat ini. Penyelidikan masih berlangsung," tuturnya. ● **gul**